



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

Selasa, 19 September 2017

Korupsi Dana Pengawasan, Eks Ketua Panwaslu Malteng Mangkir

Masohi - Eks Ketua Panwaslu Maluku Tengah, Stenly Maelissa mangkir dari panggilan penyidik. Ia dipanggil untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi dana pengawasan tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar, Senin (18/9), namun tak hadir.

Sesuai surat panggilan, Maelissa harus hadir di Kantor Kejari Malteng pukul 09.00 WIT. Namun hingga usai jam kantor, ia tak muncul tanpa pemberitahuan ke penyidik.

Plh Kepala Kejari Malteng, Victor Mailoa yang dikonfirmasi wartawan mengakui, ketidakhadiran Stenly Maelissa. Surat panggilan kedua akan dilayangkan. Diharapkan ia kooperatif.

“Kita akan mengeluarkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Kami tentu berharap yang bersangkutan kooperatif dan menghadiri panggilan kami,” himbau Mailoa.

Sesuai rencana, tim penyidik akan memanggil Maelissa untuk menghadap pada Selasa (19/8) atau Rabu (20/9).

“Mungkin besok atau lusa kami periksa yang bersangkutan. Suratnya kami siapkan hari ini dan kami harap mantan Ketua Panwaslu Malteng ini menghadiri panggilan itu,” tandas Mailoa.

Jika panggilan kedua Maelissa tidak hadir tim penyidik akan mengambil langkah tegas.

Untuk ketahui, kasus dugaan korupsi di Panwaslu Kabupaten Malteng tahun 2016-2017 senilai Rp 10,8 miliar resmi naik ke tahap penyidikan, Selasa (29/8).

Status penanganan kasus ini, naik kelas dari tahap penyelidikan ke penyidikan diputuskan dalam ekpos yang digelar di Kantor Kejari Malteng pukul 16.00 WIT hingga 18.15 WIT.

Ekpos dipimpin Kepala Kejari Malteng Robinson Sitorus. Hadir dalam rapat itu, seluruh kepala seksi, jaksa fungsional dan tim penyidik.

Kasus dugaan korupsi dana pengawasan Pilkada Malteng tahun 2016-2017 layak dinaikan ke penyidikan, sebab penyidik menemukan sejumlah bukti perbuatan melawan hukum atas pengelolaan dana nilai Rp 10,8 miliar itu.

“Setelah kami memeriksa sedikitnya 14 orang, dalam proses penyelidikan selama kurang lebih dua bulan, ditemukan bukti perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran 10,8 miliar itu, sehingga hasil ekpos kasus ini diputuskan naik ke tingkat penyidikan,” jelas Kepala Kejari Malteng, Robinson Sitorus kepada wartawan, usai ekpos.

Bukti-bukti yang ditemukan diantaranya, bukti pembayaran palsu pada sejumlah kegiatan. Hal ini melanggar pasal 132 ayat 1 Permendagri 13 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima Online

“Salah satu fakta perbuatan melawan hukum yang ditemukan dalam proses penyelidikan itu antara lain adanya bukti pembayaran yang menggunakan alat bukti asli tapi palsu. Belum lagi fakta perbuatan melawan hukum lainnya” ungkap Sitorus.

Temuan lainnya adalah pada kegiatan Bimtek. Seharusnya peserta diberi honor Rp 300 per peserta. Namun yang berikan hanya Rp 50 ribu. Tetapi dalam pertanggungjawaban dibuat seolah-olah diberikan Rp 300 ribu, dengan melampirkan bukti-bukti palsu.

“Seharusnya peserta Bimtek diberi honor 300 ribu, namun faktanya hanya dibayar 50 ribu rupiah untuk setiap peserta, namun pertanggungjawabannya memuat bukti pembayaran dengan kwitansi aspal dengan nilai 300 ribu rupiah,” ungkap Sitorus.

Kerugian Sementara

Hasil pemeriksaan sementara diduga negara dirugikan Rp 600 juta. Angka ini dapat bertambah, setelah dilakukan audit investigasi oleh BPKP.

“Untuk sementara dugaan kerugiannya itu mencapai 600 juta rupiah, angka bisa saja bertambah setelah audit investigasi nanti. Jadi sifatnya masih sementara,” jelas Sitorus.

Disinggung soal calon tersangka yang sudah dikantongi, Sitorus mengaku, lebih dari tiga orang. Namun ia menolak untuk memberitahukan identitas mereka dengan alasan kepentingan penyidikan.

“Sudah ada, mereka lebih dari tiga orang. Nanti saja, waktunya pun tidak lama, kok. Bisa jadi minggu depan atau mungkin dua pekan lagi. Intinya kita siapkan dulu strategis penyidikannya agar dapat diagendakan proses pemeriksaan untuk didalami termasuk proses penyitaan sejumlah barang bukti nanti,” jelasnya. **(S-36)**

http://www.siwalimanews.com/post/korupsi_dana_pengawasan_eks_ketua_panwaslu_malteng_mangkir